

## ***SPLIT NASIONALISME GENERASI MUDA PAPUA DI KOTA JAYAPURA : PERSPEKTIF TEORI IDENTITAS***

**Sabara**

**Peneliti Balai Litbang Agama Makassar**

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Email: [barackfilsafat@yahoo.co.id](mailto:barackfilsafat@yahoo.co.id)

### **Abstract**

This article explores the issue of split nationalism among Papuan young generation. This research was conducted to prove the pre-assumption that young generation of Papua are holding double nationalism. This research raises two main questions. First, how the Papuan and Indonesian identities are constructed among the Papuan young generation? Second, how is the modelling of Indonesian nationalism among the Papuan young generation? The issue of Papuan identity is always observed vis-à-vis Indonesian identity among Papuan young generation, which creates paradoxical manners and split identity leading to liminal identity of being both Indonesian and Papuan. Identifying Papuans as having Christian Melanesia roots against Indonesians' Muslim Malays in one hand, and Papuans' traumatic historical experiences of being discriminated and unequally treated on the other hand, have defined these two identities in paradox. This research shows that among some Papuan origins, possessing double nationalism of being Indonesian and Papuan at the same time is still apparent. Some other informants, however, have shown their awareness that Papuan identity should be fully integrated and merged into one positive and constructed Indonesian nationalism.

### **Keywords:**

*Split Nationalism, Indonesian Nasionalism, Papua Young Generation,  
Papua Origins (OAP)*

### **PENDAHULUAN**

Menurut Bernarda Malerey Menjadi Indonesia dewasa ini bagi masyarakat yang sangat beragam baik suku, budaya, agama, bahasa, geografi, pendidikan maupun ekonomi bukanlah merupakan suatu kebanggaan semata-mata dan bukan pula sesuatu yang “mudah”. Kesadaran sebagai masyarakat Indonesia baik di “pusat maupun daerah” dewasa ini masih bermasalah. Hal ini terlihat dari berbagai peristiwa yang terjadi dewasa ini di berbagai daerah di Indonesia seperti lemahnya penegakkan hukum, konflik antar partai, korupsi yang merajalela, tawuran antarpelajar dan kampung, kekerasan dalam keluarga dan

sekolah, narkoba, intoleransi dalam beragama, ancaman teroris, dan masih adanya gerakan pemisahan diri di beberapa daerah di Indonesia.<sup>1</sup>

Diantara problem untuk “menjadi” Indonesia hingga saat ini masih dirasakan oleh sebagian orang-orang Papua. Secara etno-ras, orang Papua terlihat secara nyata berbeda dengan orang Indonesia kebanyakan yang berasal dari ras Melayu sedangkan orang Papua berasal dari ras Melanesia. Pendekatan agama pun demikian, jika sebagian besar orang Indonesia menganut agama Islam, sedangkan orang Papua diidentikkan dengan agama Kristen atau Katolik.<sup>2</sup> Problem berikutnya adalah histori dan politik dimana Papua selalu mendapatkan diskriminasi dan tekanan, apalagi selama zaman orde baru, Papua menjadi Daerah Operasi Militer (DOM). Problem ketidakadilan ekonomi juga semakin melengkapi kompleksitas persoalan, yang membuat Papua akhirnya menjadi semakin “berbeda” dengan Indonesia (NKRI). Akumulasi problem inilah yang membuat nasionalisme ke-Indonesia-an pada masyarakat Papua khususnya mereka yang disebut sebagai Orang Asli Papua (selanjutnya disebut OAP) mengalami *split* dalam bahasa Bernarda Malerey sebagai “nasionalisme ganda”.

Ketika Papua dilanda konflik, “keindonesiaan orang Papua sering dipertanyakan.” Kondisi ini pernah diungkapkan Manuel Kaisiepo dan Neles Tebay yang mempertanyakan mengapa setelah integrasi dengan Indonesia pada 1 Mei 1963 masih muncul Organisasi Papua Merdeka (selanjutnya disebut OPM) pada 1965 dan hingga kini walaupun eksistensi OPM tidak berarti secara politik dan lebih-lebih secara militer, gerakan-gerakan itu masih ada bahkan berbagai aksi mahasiswa yang mengibarkan bendera Kejora dan bukan Merah Putih di berbagai tempat seperti di Denpasar, Jogja dan Jakarta. Berbagai kejadian yang terjadi ini di Papua membuktikan bahwa masih rendahnya nasionalisme Indonesia di hati orang Papua. Morin juga mempertanyakan mengapa sejak integrasi 1963 hingga dewasa ini

---

<sup>1</sup> Bernarda Malerey, *Kontestasi Nasionalisme Papua dan Nasionalisme Indonesia Sebelum dan Sesudah Orde Baru*, Makalah pada Seminar Akhir Tahun “Integrasi Sosial Ekonomi, Sosial Budaya, dan Sosial Politik Papua ke Indonesia: Tinjauan Akademik. Kamis 18 Desember 2014, h. 1.

<sup>2</sup> Islam oleh sebagian besar masyarakat asli Papua diidentikkan dengan pendatang dan oleh beberapa kalangan dari kelompok separatis OPM, Islam sering dikaitkan dengan NKRI. Perasaan terdiskriminasi dari masyarakat muslim asli Papua tampak dari pernyataan beberapa orang, bahwa muslim Papua mengalami diskriminasi dua kali, sebagai orang Papua mengalami diskriminasi dari NKRI, dan sebagai muslim terdiskriminasi oleh sesama warga asli Papua Lihat Sabara, “Pola Pembinaan Muallaf di Kota Jayapura Jurnal *al-Qalam Volume 18 Nomor 2 Tahun 2012, h.188-198*.”

pohon keindonesiaan tidak tumbuh di antara orang Papua. Tim LIPI pada 2007 juga masih mempertanyakan mengapa sudah 62 tahun Indonesia merdeka, nasionalisme Indonesia di Papua mulai dipertanyakan kembali?, pertanyaan-pertanyaan ini ternyata masih relevan dengan pertemuan hari ini yang barangkali masih mempersoalkan nasionalisme Indonesia di antara orang Papua.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, menelisik lebih dalam tentang Nasionalisme ke-Indonesia-an pada masyarakat Papua masih menjadi tema yang menarik. Penelitian ini berfokus pada *split* nasionalisme di kalangan generasi muda Papua, secara spesifik di Kota Jayapura. Pemilihan segmentasi generasi muda didasarkan pada asumsi bahwa mereka adalah kelompok umur produktif dan menjadi pilar penting bagi masa depan relasi nasionalisme ke-Indonesia-an dengan identitas ke-Papua-an. Kota Jayapura dipilih karena di kota ini menjadi pusat “perjumpaan” antara “Indonesia” dengan “Papua” selain karena kota ini merupakan kota terbesar dan ibukota provinsi Papua. Teori identitas digunakan sebagai perspektif didasarkan pada asumsi bahwa diantara problem yang menjadi akar persoalan nasionalisme OAP adalah problem identitas ke-Papua-an yang kerap dibenturkan dengan identitas ke-Indonesia-an.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana konstruksi identitas ke-Papua-an dan identitas ke-Indonesia-an generasi muda Papua di Kota Jayapura? dan Bagaimana *modeling* nasionalisme ke-Indonesia-an generasi muda Papua di Kota Jayapura?

## **TINJAUAN TEORITIK**

### **1. Teori Identitas**

Pembentukan nasionalisme dan sub-nasionalisme (melalui gerakan Pemisahan dari *nation* induk) menandai sejarah politik dunia dan bersifat universal di dalam kehidupan politik suatu negara bangsa. Namun, menurut Benedict Anderson pemahaman mengenai nasionalisme juga mengalami pertentangan sepanjang

---

<sup>3</sup>Bernarda Malerey, *Kontestasi Nasionalisme Papua dan Nasionalisme Indonesia Sebelum dan Sesudah Orde Baru*, h. 1.

sejarah. Tom Nairn menyebut nasionalisme sebagai ‘penyakit sejarah perkembangan masyarakat modern’, atau sebuah ‘neurosis’ yang juga memiliki ambiguitas dan karenanya akan terus mengandung dilema yang tak terobati. Tom Nairn sekaligus menyebut kehadiran nasionalisme sebagai ‘kegagalan sejarah yang besar dari Marxisme’. Anderson juga mengatakan bahwa nasionalisme adalah ‘satu komunitas politik yang terbayangkan – dimana secara inheren memiliki keterbatasan tetapi berdaulat’ – yang memiliki legitimasi emosional. Sebab, meskipun sesama warga dari sebuah bangsa tidak saling mengenal, mereka memiliki tali ikatan persaudaraan dan persamaan (the image of communion), Ikatan persaudaraan horisontal menjadi satu dasar bagi anggota sebuah bangsa mengikatkan diri di dalam entitas satu bangsa.<sup>4</sup>

Anderson menyebutkan bahwa budaya, agama, bahasa dan sejarah dinasti bisa menjadi dasar pembentukan bangsa atau masyarakat terbayang (*the imagined community*). Kolonialisme yang datang dengan budaya, bahasa dan agama berbeda dengan gampang dapat menyakinkan bangsa yang dijajah untuk menjadi satu entitas yang berbeda karena mereka memiliki akar budaya, kepercayaan, bahasa yang berbeda dari sosok penjajah mereka. Namun, berkaitan dengan faktor kesamaan ini, Laclau mensyaratkan satu elemen ‘positif’ semacam ini harus selalu disertai dengan identitas jenis apa yang mereka tolak jika tidak maka kita akan menjalani resiko mengesensialkan identitas (*essentialising identity*). Oleh karenanya, seluruh kesamaan yang dikatakan Anderson harus dipahami bukan sebagai suatu asimilasi yang total. Identitas adalah suatu yang bergerak terus, dinamis, dan akan sangat bergantung konteksnya.<sup>5</sup>

Nasionalisme sebuah kemenjadian sejarah (*a historical being*), maka sekali terbentuk nasionalisme kemudian menjadi satu ‘modular’, yang ‘dapat ditransplantasikan, dengan derajat-derajat kesadaran diri berbeda, menyatukan dan disatukan dalam hubungannya dengan berbagai konstelasi ideologi dan politik’.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>BROG Anderson. *Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, (London: Vermo, 1991), h.3.

<sup>5</sup> Ahmad Taufan Damanik, *Hasan Tiro: Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis*, (Jakarta: Friederich Ebert Stiftung [FES], 2010), h. 20

<sup>6</sup>BROG Anderson. *Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, h. 4.

Konstelasi ideologi-politik itulah yang terus-menerus akan mempengaruhi bentuk gagasan nasionalisme maupun prakteknya di dalam kehidupan sosial politik suatu masyarakat. Konstelasi itu pula yang menyebabkannya mengalami pasang-surut yang tidak pernah henti, meski adakalanya bubar atau memecah menjadi beberapa sub-nasionalisme yang kemudian berdiri sendiri. Proses kesejarahanlah satu-satunya yang bisa dijadikan patokan tentang masa depan suatu nasionalisme.<sup>7</sup>

## 2. Teori Nasionalisme

Identitas merupakan hal yang penting, karena identitas merupakan pemahaman tentang diri sendiri. Identitas dapat berasal dari berbagai aspek, seperti kebudayaan, etnis, kelas sosial, agama, maupun jenis kelamin. Identitas memberikan gagasan tentang siapa diri seseorang atau siapa diri kolektif sekelompok orang. Pengenalan tentang diri menurut Toety Heraty Noerhadi merupakan pengenalan yang berlangsung lewat suatu *regressio ad infinitum* atau suatu kegiatan yang tak ada akhirnya.<sup>8</sup>

Identitas adalah suatu proses pengidentifikasian diri dan kelompok yang akhirnya mempolarisasi subjek menjadi “us” and “them” atau “kita” dan “mereka”. Dengan demikian, identitas adalah sebuah proses representasi ke-diri-an, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial tertentu. Orang-orang akan sadar akan identitas ketika mereka berinteraksi dengan orang luar. Setiap Identitas, baik identitas diri, maupun identitas kelompok (termasuk etnik dan agama) akan berkembang melalui perjumpaan dan persaingan dan bukan melalui mengisolasi atau mengasingkan diri.

Identitas ada yang bersifat situasional, temporer, dan permanen. Identitas ada yang bersifat perolehan (*achieve*) dan ada yang bersifat bawaan (*achieved*). Identitas ada yang terbentuk dari ikatan kolektif yang bersifat kognitif-emosional (seperti agama dan ideologi), ada yang bersifat geneologis (etnik), dan konstruksi lingkungan sosial (budaya). Identitas pun tidak bebas nilai, ia merupakan konstruksi sosial yang berlangsung dalam suatu ruang

---

<sup>7</sup>Ahmad Taufan Damanik, *Hasan Tiro: Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis*, h.21.

<sup>8</sup>Toety Heraty Noerhadi, *Aku dalam budaya: Telaah Teori dan Metodologi Filsafat Budaya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2013), h. 139.

dan waktu yang panjang.<sup>9</sup> Akhirnya, memahami identitas bukanlah memahami tentang sebuah *reference* yang tunggal, tapi merujuk pada *reference* yang kompleks.

Merujuk pada teori Barker, identitas merupakan konsepsi yang diyakini seseorang tentang dirinya, sementara harapan dan pandangan orang lain terhadap diri seseorang akan membentuk identitas sosial. Meskipun terdapat dua pemisahan tersebut, sebagai pribadi yang utuh, seseorang harus memiliki seluruh aspek sosial dan kultural. Sehingga identitas merupakan konstruksi sosial dan tidak mungkin eksis di luar representasi sosial dan kultural.<sup>10</sup> Dengan demikian, identitas bersifat personal sekaligus sosial, seseorang tidak bisa sepenuhnya keluar dari representasi sosial dan kultural struktur yang membentuknya dan mengikatnya ke dalam suatu ikatan kolektif. Dari sinilah lahir konsep tentang “aku” dan “kita” sebagai identitas yang integral.

Dalam perspektif teori identitas, merujuk pada teori Amartya Sen, suatu identitas dipilih lebih memperhatikan aspek signifikansi sosialnya. Bukan cuma nalar yang berperan dalam pilihan identitas, melainkan pertimbangan akan konteks sosial dan relevansinya.<sup>11</sup> Identitas tampil dalam ruang perbedaan berjaln kelindan dengan kesadaran dan pemaknaan.<sup>12</sup> Mengkaji identitas kebudayaan sekelompok manusia, berarti mengkaji keseluruhan konstruksi tentang “kedirian”, mulai dari cara berpikir, perasaan, hingga cara bertindak, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas.

Konstruksi seseorang atas identitas meniscayakan hadirnya persepsi tentang “diri” yang berbeda dengan yang lain (*self and other*)<sup>13</sup> Konstruksi akan *self and other* tidak hanya menyangkut individu, melainkan komunitas sebagai kosntruksi identitas kolektif dari individu-individu. Sebagaimana dikatakan oleh Amartya Sen, keanggotaan dalam komunitas merupakan perpanjangan dari individu seseorang,<sup>14</sup> sehingga kesadaran kolektif disamakan dengan kesadaran individu, identitas indivdu lebur dalam identitas

---

<sup>9</sup>Manuel Castells. *The Power of Identity* (Chisester, West Sussex:Blackwell Publishing Ltd, 2010), h. 6.

<sup>10</sup>C. Barker, *Cultural Studies: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006)., h. 173-174.

<sup>11</sup>Amartya Sen, *Identity and Violence: the Illusion of Destiny*, (Cet, I; Ne Yowk-London: W.W. Norton and Company, 2006), 28.

<sup>12</sup>Peter J Burke dan Jan E. Steets, *Identity Theory*, (New York: Oxford University Press, 2009), h. 38

<sup>13</sup>Peter J Burke dan Jan E. Steets, *Identity Theory*, h. 38.

<sup>14</sup>Amartya Sen, *Identity and Violence: the Illusion of Destiny*, h. 21.

kolektif. Dari sinilah kemudian lahir kesadaran tentang *in-group* (kelompok kita) dan *out-group* (kelompok mereka).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dengan generasi muda sebagai subyek penelitian jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi hal-hal yang berkenaan dengan persepsi nasionalisme generasi muda Papua di Kota Jayapura. Sebagai penelitian kualitatif, maka penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan pemanfaatan dokumen tertulis maupun gambar dan video. Selain itu untuk melengkapi dan sekaligus mengkonfirmasi data yang didapatkan, peneliti juga menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai salah satu kiat untuk memperoleh data yang valid. Penentuan informan untuk penelitian kualitatif dilakukan dengan cara *purposive*.<sup>15</sup> Informan diambil dari kelompok pemuda asli Papua yang memiliki keaktifan dalam organisasi kepemudaan. Informan adalah pemuda OAP baik beragama Kristen sebagai agama dominan OAP maupun pemuda OAP muslim sebagai representasi agama minoritas OAP. Dengan pertimbangan kemaslahatan informan, peneliti menggunakan nama samaran demi mengaburkan identitas beberapa informan.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konstruksi Sosio-Demografis Kota Jayapura**

Kota Jayapura adalah kota provinsi yang terletak paling Timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua Nugini. Kota Jayapura (pada awalnya bernama Holandia) didirikan oleh Kapten Infanteri FJP Sachs pada 7 Maret 1910, kini memiliki 5 distrik (kecamatan), 25 kelurahan dan 14 kampung. Total penduduk Kota Jayapura tahun 2017 sebanyak 644.652 jiwa dengan komposisi 65% penduduk non Papua dan 35% penduduk asli Papua (OAP). Penduduk asli Kota Jayapura tersebar di 14 kampung

---

<sup>15</sup>Naniek Kasniyah, *Teknik Menentukan Informan dalam Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h.7.

dengan suku dominan adalah suku Numbai dan Anafri. Secara sosio-demografis, Kota Jayapura merupakan “miniatur” Indonesia yang terdiri dari beragam etnik, budaya, dan agama. Keragaman inilah yang membentuk karakteristik khas sosio-kultural masyarakat Jayapura yang merupakan pertemuan dari beragam manusia dari berbagai latar belakang, di samping kultur Papua yang masih cukup kental mewarnai kehidupan masyarakat.

Agama menjadi bagian penting dalam sistem sosio-kultural Papua dengan prinsip “tiga tungku satu batu”, yaitu “tungku” adat, pemerintah, dan agama.<sup>16</sup> Ketiganya mbingkai pola hubungan sosial masyarakat di Papua, termasuk di Kota Jayapura. Secara sosio-keagamaan, Kota Jayapura adalah ruang pertemuan 2 agama besar (Kristen dan Islam) yang keduanya hampir memiliki jumlah penganut yang berimbang. Umat Kristen berjumlah 287.335 jiwa atau 44,57% sedangkan umat Islam sebanyak 257.328 jiwa atau 39,91%. Penganut Katolik sebanyak 85.492 jiwa atau 13,26%, penganut agama Hindu dan Buddha masing-masing 2.116 jiwa dan 2.381 jiwa atau 0,33% dan 0,37%.

Migrasi ke wilayah Papua (khususnya Jayapura) ketika Papua menjadi bagian dari Hindia Belanda. Migrasi ini pun berkaitan dengan sistem pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengambil beberapa tenaga administrasi dari Maluku, Kei, dan Manado.<sup>17</sup> Mulai saat ini pula, agama menjadi isu cukup sentral. Pada periode ini, Kristen menyebar dengan sangat masif, dimana perkembangannya bukan hanya di pusat-pusat perkotaan, melainkan juga naik ke gunung-gunung. Migrasi terbesar dan hingga kini memunculkan banyak problem adalah sejak Papua secara resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia pada 1969. Pemerintah Indonesia mengirim banyak sekali pegawai pemerintahan dari wilayah Indonesia Timur, Tengah, dan Barat (Maluku, Sulawesi, dan Jawa) dan program transmigrasi yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. Migrasi ini berakibat pula pada dinamika ekonomi Papua (khususnya di perkotaan), di mana banyak migran yang melakukan perdagangan di Papua.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>John Manangsang Wally, *Dunia dalam Genggaman Papua: Sebuah Fenomena Geo-Politik Global*, (Jayapura: Naskah Belum Diterbitkan, 2018),h.34.

<sup>17</sup>Lihat Bernarda Meleray, *Nasionalisme Ganda Orang Papua*, (Jakarta: Kompas,2012),h.25-26.

<sup>18</sup>Budi Asyhari Afwan, *Mutiara Terpendam Papua: Potensi Kearifan Lokal untuk Perdamaian di Tanah Papua*,(Yogyakarta: CRCS, 2015), h.16.

Pertumbuhan angka migrasi di Papua ini mulai memperlihatkan efeknya, utamanya perbedaan yang tajam antara urban-rural, pergeseran peluang akses ekonomi, dan kompetisi di sektor ekonomi strategis. Selain itu, fenomena pendatang di Papua selalu seiring dengan perkembangan hal-hal lain, termasuk agama. Migrasi pada zaman kolonial berbarengan dengan masuk dan berkembangnya Kristen, Sementara migrasi pasca integrasi ke NKRI berbarengan dengan pertumbuhan signifikan pemeluk Islam di daerah-daerah urban di Papua, sekaligus juga naiknya perekonomian dan perindustrian di Provinsi Papua. Pengaruh yang paling terlihat dari migrasi ini, sebagaimana disebutkan oleh Farhadian, adalah kultur Papua yang mengalami perubahan. Dia memberikan contoh kehidupan kota Jayapura yang digambarkan sebagai metropolitan yang semua fasilitasnya berbanding terbalik dengan yang ada di wilayah gunung. Kondisi kota itu mampu mengubah pandangan budaya dan gaya hidup masyarakat. Dan semua itu dipengaruhi oleh banyaknya pendatang dari luar Papua.<sup>19</sup>

Membaca konteks sosio-kultural Jayapura terkait dengan orang asli Papua dan pendatang, menurut Dr. Hafid Yusuf -Sekjen YAPIS Papua-, penduduk Jayapura harus dibagi ke dalam 3 kategori; orang Papua asli, pendatang yang lahir atau besar di Papua, dan pendatang yang belum lama bermigrasi ke Papua. Untuk penduduk kategori pertama dan kedua secara sosio-kultural telah “lebur” dalam akulturasi sosio-kultural dan membentuk sebuah sosio-kultur baru sebagai hasil pertemuan ragam budaya lokal Papua dan heterogenitas budaya penduduk pendatang. Penduduk pendatang yang lahir atau besar di Papua telah mengalami proses ”kulturalisasi” Papua sehingga secara sosiologis merasa sebagai ”orang papua” dan oleh orang asli Papua mereka disebut sebagai “Papua lurus” untuk membedakan dengan penduduk asli Papua yang menyebut diri “Papua keriting”. Penduduk kategori ketiga yang biasanya belum lama menetap di Papua inilah yang kerap menjadi pemicu patologi sosial di Papua baik karena faktor ekonomi maupun faktor sosial lainnya. Tak bias diungkiri ada sebagian orang asli Papua yang memiliki rasa fanatisme yang berlebihan terhadap identitas ke-Papua-an mereka, namun kelompok ini hanyalah

---

<sup>19</sup>Lihat Budi Asyhari Afwan, *Mutiara Terpendam Papua...*,h.16-18

sebagian kecil dari orang asli Papua. Secara umum, orang asli Papua adalah orang yang bersikap terbuka terhadap pendatang dari luar Papua.

## 2. Konstruksi Identitas ke-Papua-an dan ke-Indonesia-an

Ketegangan politik yang semakin meningkat di Tanah Papua selalu disertai oleh terbentuknya opini publik yang menjadi wacana politik dominan di media massa. Wacana tersebut terkait dengan konstruksi identitas politik orang Papua yang dipertentangkan dengan Indonesia sebagai berikut: (1) orang Indonesia versus orang Papua, (2) pendatang versus orang Papua asli, dan (3) NKRI versus separatis, (4) Islam = Indonesia = TNI = pendatang versus Papua = Kristen = orang asli = separatis. Pada konteks ini segregasi politik dianggap berhimpitan dengan segregasi etnik dan agama.

Jika identitas ke-Indonesia-an dipahami sebagai diskursus yang kebenarannya dianggap absah atau tidak dapat ditanyakan lagi sebab-sebabnya dalam ranah politik di Tanah Papua (*doxa*), maka kalangan Kristen Papua sedang melakukan konstruksi diskursus yang melawan wacana dominan tersebut (*heterodoxa*) yang mendelegitimasi wacana ke-Indonesia-an. Misalnya hal ini dilakukan dengan mengatakan bahwa Indonesia (TNI) telah melakukan pelanggaran HAM terhadap orang Papua asli, orang Indonesia merupakan pendatang (Melayu) yang berbeda dengan orang Papua asli (Melanesia). Namun, pada sisi lain, berkembang pula diskursus yang mendukung wacana dominan identitas ke-Indonesia-an (*orthodoxa*) yaitu mengidentifikasikan umat Islam di Papua sebagai pendukung-pendukung NKRI. Wacana ini diduga sengaja dikonstruksi oleh oknum-oknum tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari kalangan umat Islam di Tanah Papua.<sup>20</sup>

Yustinus, seorang aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jayapura menyebutkan kepada peneliti bahwa identitas kebangsaan OAP pada dasarnya terbelah dalam dua identitas yang satu samalain kerap diperhadap-hadapkan secara dikotomik, yaitu identitas sebagai orang Papua dan identitas sebagai orang Indonesia. Antara dua identitas tersebut satu sama lain kerap sulit untuk melebur. Selain karena hal-hal yang sifatnya fisik berbeda dengan orang Indonesia kebanyakan, secara historis,

---

<sup>20</sup> Cahyo Pamungkas, *Majelis Muslim Papua: Strategi Pembentukan Identitas Orang Papua Asli yang Beragama Islam*, (Laporan Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2011), h. 3.

kultural, dan politis, ke-Papua-an adalah hal yang berbeda dengan ke-Indonesia-an. Penajaman identitas ke-Papua-an semakin diperuncing dengan sikap diskriminasi yang diterima oleh OAP baik dari pemerintah maupun oleh warga Indonesia lainnya. Tampilan yang berbeda semisal kulit yang hitam dan rambut yang keriting membuat OAP yang berada diluar Papua, semisal di Jawa atau Sulawesi kerap mengalami diskriminasi berupa ujaran-ujaran yang bernuansa rasial. Stigmatisasi kepada orang Papua sebagai orang yang primitif, jorok, bahkan kanibal membuat orang Indonesia non Papua selalu menghindari untuk berinteraksi langsung dengan orang Papua dalam jalinan persahabatan yang dekat. Menurut Yustinus, pengalaman diskriminasi dan stigmatisasi yang dialami oleh pemuda-pemuda Papua yang ada di luar membuat identitas ke-Papua-an mereka semakin mengental dan mereka meyakini bahwa sebagai Papua memang benar-benar berbeda dengan Indonesia, meski secara politik Papua berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yustinus menambahkan bahwa untuk membuat lebur identitas ke-Papua-an dengan ke-Indonesia-an maka perlu sikap aktif dari orang-orang Indonesia melihat saudara-saudara mereka di Papua sebagai bagian dari mereka, sebagai saudara mereka yang tak berbeda dengan mereka. Ketika ditanya mengenai Identitas ke-Kristen-an menurut Yustinus sebenarnya bukan hal yang terlalu mengakar karena ke-kristen-an baru diterima oleh OAP baru lebih satu abad, bahkan Islam lebih dulu diterima oleh OAP yang bermukim disekitar pesisir wilayah Kepala Burung. Atribusi identitas Kristen pada identitas Papua hanyalah untuk semakin memperlebar jarak identitas antara Papua dengan Indonesia, karena kebetulan mayoritas OAP adalah Kristen dan mayoritas orang Indonesia adalah muslim

Menurut Asso, seorang aktivis pemuda muslim asli Papua asal Wamena yang kini beraktivitas di Kota Jayapura, sebagai OAP yang beragama Islam mengalami dua kali diskriminasi identitas, yaitu sebagai orang Papua terdiskriminasi dari orang Indonesia dan sebagai muslim terdiskriminasi dari sesama orang Papua. Hal ini membuat OAP yang beragama Islam, khususnya yang berasal dari Pegunungan Tengah akhirnya sulit untuk merasa sebagai Indonesia dan kurang diterima sebagai orang Papua akibat perbedaan agama, Menurut Asso, ada upaya mengidentikkan Papua dengan Kristen agar ke-Papua-an semakin berjarak dengan ke-Indonesia-an, sehingga separatisme Papua akan terus

terpelihara dalam memori orang Papua, khususnya yang beragama Kristen. Di kalangan muda OAP Kristen ada sebagian OAP khususnya yang berasal dari Pegunungan Tengah menurut Asso yang bersikap *nyinyir* dengan saudara-saudara OAP Pegunungan Tengah yang beragama Islam. Hal ini dikarenakan anggapan dengan menjadi Islam maka identitas ke-Papua-an mereka tergerus dan lebih kental identitas ke-Indonesia-annya karena menganut agama sama dengan mayoritas rakyat Indonesia.

Menurut Cahyo Pamungkas yang pernah melakukan penelitian tentang Majelis Muslim Papua di tahun 2010, mengutip informasi dari Pdt Beny Giay menerangkan mengapa Islam di Tanah Papua diidentifikasi dekat dengan NKRI. Hal ini bermula dari konflik antar suku yang hampir bersamaan dengan operasi militer menumpas OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya pada pertengahan tahun 1977. Pada waktu itu, agama Kristen sedang diperkenalkan oleh misi Zending di Lembah Baliem. Ada kelompok suku-suku yang menerima dan ada yang menolak agama ini. Kemudian, para misionaris barat memaksakan kelompok suku-suku yang menerima agar membuang sebagian adat dan tradisinya. Sebelumnya, kalau ada pesta adat di Lembah Baliem maka kedua komunitas itu datang secara bergantian menyiapkan pesta. Namun, sesudah agama Kristen masuk, satu kelompok yang melakukan upacara tidak didatangi kelompok lain karena mereka telah memeluk agama Kristen, sehingga mereka harus menanggung sendiri pesta itu. Hal ini menjadikan kelompok suku-suku yang tidak menerima agama Kristen merasa sakit hati dan bekerja sama dengan TNI di bawah Kapten Tahir untuk menumpas OPM di daerah Jayawijaya. Selanjutnya, menurut Giay, kelompok suku ini memilih untuk memeluk agama Islam. Pdt Beny Giay mengatakan bahwa setelah perang berhenti, mereka tetap memeluk agama Islam untuk mendapat perlindungan dari TNI, tetapi tidak diketahui alasannya apakah dengan sukarela ataukah terpaksa. Bertolak dari pengidentifikasian umat Islam sebagai pendukung NKRI (TNI) dan pendatang yang ber ras Melayu orang Papua asli, maka munculah keprihatinan di kalangan sejumlah tokoh Muslim karena konstruksi identitas tersebut kalau dibiarkan berkembang terus menerus, dapat memicu terjadinya konflik horisontal antara umat beragama dan juga antara masyarakat asli dengan pendatang di Tanah Papua. Hal ini dapat dimengerti mengingat

bahwa mayoritas pemeluk agama Islam di kota-kota di Papua, seperti Jayapura, pada umumnya berasal dari kalangan pendatang Jawa, Bugis, Buton, dan Makassar. Orang Papua asli yang beragama Islam hanya dapat ditemukan di Kabupaten Fak-fak, Kaimana, Sorong, Raja Ampat, dan Jayawijaya. Menurut Pdt Herman Awom, Muslim Papua adalah kelompok yang terjebak antara Indonesia dan Papua. Mereka tidak diakui Indonesia karena orang Papua dan tidak diakui orang Papua karena beragama Islam.<sup>21</sup>

Walhasil, menurut peneliti, problem dasar antara Papua dan Indonesia adalah problem identitas yang terbelah pada kalangan OAP yang "gamang" antara posisi identitas ke-Papua-an atau ke-Indonesia-an". Pada lapis permukaan, mereka memiliki identitas ke-Indonesia-an karena secara politik mereka adalah Warga Negara Indonesia (WNI) mau tidak mau harus mengakui Indonesia sebagai negara mereka. Namun, di sisi lain, pada lapisan yang lebih dalam identitas ke-Papua-an lebih kuat mengikat secara emosional disebabkan berbagai faktor yang telah disebutkan di atas. Keterbelahan identitas ini menjadikan OAP berada pada liminalitas identitas sebagai Indonesia dan sebagai Papua, dan hal ini pun terwariskan kepada generasi muda OAP akibat belum adanya upaya nyata peleburan identitas tersebut.

### **3. Nasionalisme Generasi Muda Papua**

Menurut Melerey Di Papua, kesadaran ke-Indonesiaan- muncul ketika kesadaran ke-Papua-an sudah bersemi, tumbuh secara perlahan dan melalui proses yang panjang. Problematika awal adalah ketika para penggagas awal nasionalisme Indonesia berasal dari luar Papua yang tidak dipersiapkan untuk mengindonesiakan orang Papua. Proses membangun ke-Indonesia-an di Papua pun berlangsung sangat singkat tanpa melalui pendidikan formal, perencanaan yang matang dan menggunakan pola asrama. Upaya yang dilakukan umumnya adalah secepat mungkin menyebarkan nasionalisme Indonesia melalui himbuan, diskusi, rapat, dan pembentukan partai politik. Dengan berbagai kebijakan pemerintah, dalam hal ini militer terhadap masyarakat yang dianggap tidak nasionalis Indonesia, langsung ditindak tanpa memahami bagaimana orang Papua pada masa itu

---

<sup>21</sup>Cahyo Pamungkas, Cahyo Pamungkas, *Majelis Muslim Papua: Strategi Pembentukan Identitas Orang Papua Asli yang Beragama Islam*, h. 5-6.

mengetahui dan memahami proses integrasi apalagi menyangkut kesadaran Ke-indonesia-an. Di satu pihak tindakan membasmi gerakan anti Indonesia dapat dianggap benar mengingat Papua adalah bagian dari NKRI sementara di pihak lain pendekatan yang lebih militerisme justru memperkuat kesadaran ke-Papua-an.<sup>22</sup>

Ketika peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan dari kalangan aktivis muda OAP umumnya membenarkan pandangan yang disampaikan oleh Bernarda Melerey tentang nasionalisme ganda orang Papua. Menurut Augusto seorang aktivis muda OAP Kristen, nasionalisme Indonesia orang Papua pada dasarnya adalah nasionalisme yang bersifat artifisial. Khususnya di kalangan generasi muda Papua, nasionalisme ke-Indonesia-an masih terbentur dengan nasionalisme ke-Papua-an. Menurut Augusto, kendala besar untuk menjadikan orang Papua memiliki semangat jiwa nasionalisme Indonesia adalah problem ketidakadilan dan diskriminasi yang dirasakan oleh generasi muda Papua. Bagaimana mungkin nasionalisme ke-Indonesia-an akan terbangun jika belum tampak iktikad baik pemerintah pusat untuk merangkul Papua dengan memberikan pemerataan pembangunan sebagaimana di daerah lain. Ketika peneliti menanyakan progress pembangunan Papua di masa Presiden Jokowi, yang begitu banyak membangun infrastruktur di Papua, Augusto menyatakan memang ada perubahan yang cukup besar sejak masa pemerintahan Presiden Jokowi dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Pembangunan infrastruktur dan perhatian pemerintah pusat di era Jokowi mulai menyemai rasa memiliki terhadap NKRI dari OAP. Generasi muda Papua menurut Augusto mulai tumbuh kepercayaan kepada pemerintah pusat meski diakui belum sampai pada tahap menguatnya nasioanalisme ke-Indonesia-an atau meleburnya nasionalisme ke-Papua-an dalam jiwa nasionalisme ke-Indonesia-an. Oleh karena itu, menurut Augusto problematika nasionalisme di kalangan OAP akan mudah terbangun melalui *political will* dari pemerintah pusat yang memberikan perhatian dan pemerataan kepada masyarakat Papua.

Menurut Elsyie, seorang mahasiswi Papua yang kuliah di Universitas Cendrawasih, nasionalisme ke-Indonesia-an dikalangan generasi muda Papua pada dasarnya

---

<sup>22</sup> Lihat Bernarda Meleray, Cahyo Pamungkas, *Majelis Muslim Papua: Strategi Pembentukan Identitas Orang Papua Asli yang Beragama Islam*, h. 4-6.

diperhadapkan dengan faktor politik dari kelompok separatisme Papua merdeka (OPM) yang memiliki cita-cita Papua merdeka lepas dari NKRI. Di sebagian kalangan generasi muda Papua, simpati kepada perjuangan Papua merdeka merupakan bentuk rasa frustrasi kepada pemerintah Indonesia dan hadirnya harapan akan masa depan Papua yang lebih baik jika merdeka. Selain itu persoalan identitas ke-Papua-an adalah faktor yang tak kalah menonjol, sehingga meski dengan pemerataan pembangunan sekali pun orang Papua tetap sulit merasa sama dengan Indonesia. Problematika politik Papua adalah politik identitas, bahwa Papua bukan Indonesia dan Indonesia bukan Papua. Identitas ke-Papua-anah yang mengkristal sehingga nasionalisme ke-Indonesia-an sulit untuk diterima. Menurut Elsyie, nasionalisme ke-Papua-an adalah harga mati karena Papua adalah Papua, yang secara ras bukan Melayu tapi Melanesia. Elsyie tetap yakin bahwa perjuangan separatisme Papua merdeka akan selalu ada, meski tentu saja tidak akan terlalu signifikan pengaruhnya jika masyarakat Papua telah menikmati keadilan dari pemerintah Indonesia.

Pandangan yang agak berbeda disampaikan oleh Marianus seorang aktivis sebuah organisasi kepemudaan di Jayapura. Dia mempertanyakan jika ada yang disebut dengan istilah nasionalisme Papua itu seperti apa? Apakah nasionalisme ke-Melanesia-an dengan identitas kulit hitam dan rambut keriting? Bagi Marianus, penyematan atribut tersebut bagi nasionalisme Papua adalah artifisial. Kesamaan warna kulit dan model rambut tidak akan bisa benar-benar menjadi penyatu atau pembentuk nasionalisme Papua yang *vis a vis* nasionalisme Indonesia. Menjadi Papua bukan berarti menegasi Indonesia. Menjadi Papua berarti sejatinya menjadi Indonesia yang utuh. Papua dengan segala kekhasannya justru menjadi satu bagian dari mozaik kebhinekaan Indonesia dan akan semakin memperteguh identitas sebagai Bangsa Indonesia yang bhineka. Bagi Marianus, yang disebut nasionalisme Papua adalah nasionalisme primordial yang semu dan justru kontra produktif dengan kemajuan masyarakat Papua. Jika masyarakat Papua ingin maju, maka solusi terbaik adalah tetap dalam NKRI dan bersama saudara-saudara bangsa Indonesia yang lain untuk bahu-membahu membangun Indonesia dengan demikian secara langsung maupun tak langsung juga membangun Papua. Ketika dikonfirmasi mengenai problem diskriminasi dan ketidakadilan yang dirasakan oleh OAP, menurut Marianus, yang menyebut dirinya sebagai

OAP juga harus sadar dan keluar dari eksklusivisme mereka dengan masuk dan bergaul dengan sesama orang Indonesia yang lain. Stigma yang terbangun kepada OAP mestinya menjadi cambuk bagi OAP untuk membuktikan yang sebaliknya kepada saudara-saudara mereka orang Indonesia yang lain. Bagi Marianus, OAP harus membuka mata bahwa pelaku ketidakadilan justru dilakukan oleh pejabat-pejabat lokal yang *notabene* adalah OAP. Dana otonomi khusus yang begitu besar dinikmati hanya oleh segelintir elit lokal, sedangkan masyarakat Papua masih menderita. Langkah pemerintah pusat dengan memberikan otonomi khusus dan pembangunan infrastruktur harus diapresiasi sebagai sebuah langkah maju dan jangan dirusak dengan perjuangan separatisme yang membuat Papua justru akan semakin kacau dengan kompleksitas persoalan yang semakin carut-marut.

Pernyataan senada dengan Marianus diungkapkan oleh Achmad Bauw, seorang generasi muda Papua muslim asal Fak-fak. Menurut Bauw, menguatkan nasionalisme Papua yang selalu diperhadapkan dengan nasionalisme Indonesia justru akan memicu perpecahan internal di kalangan mereka yang mengklaim diri sebagai OAP. Menurut Bauw, saat ini justru terjadi friksi internal dengan klaim siapa yang paling Papua. OAP asal Pegunungan Tengah mengklaim diri sebagai Papua yang asli sedangkan OAP yang berasal dari pesisir dianggap ke-Papua-an mereka sudah tidak original lagi. Friksi antara Papua gunung dan Papua pantai akan membuat terjadi perang saudara di Papua. Bergabung dengan NKRI adalah langkah tepat agar pertentangan internal tidak mengkristal menjadi perang saudara. Nasionalisme ke-Indonesia-an menurut Bauw harus dimaknai sebagai sebuah sikap aktif dalam persatuan pada kebhinekaan yang membuat masyarakat Papua akan semakin dewasa dan maju.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Melerey, bahwa selama masih menguatnya nasionalisme Papua di antara orang Papua dan memperlihatkan lemahnya keindonesiaan di Papua selama ini harus didukung dengan pengertian dan logika yang memadai. Matindas dalam bukunya mengulas “Negara Sebenarnya” menjelaskan bahwa paham nasionalisme harus ditegakkan oleh pengertian dengan logika yang memadai, bukan dibiarkan tanpa pengertian jelas dan yang penting dirasakan sebagai api emosi yang besar membakar

semangat. Paham nasionalisme harus dijernihkan dalam konstruksi logika yang jelas dan dibutuhkan, agar dapat berfungsi sebenar-benarnya. Nasionalisme yang benar adalah yang mampu menghindarkan negara dari segala kehancuran.<sup>23</sup> Oleh karena itu, menurut peneliti nasionalisme ke-Indonesia-an harus terus menerus diformulasikan dengan menanamkan kesadaran identitas ke-Papua-an tidak paradoks dengan identitas ke-Indonesia-an. selain itu, *political will* tetap harus ditunjukkan oleh pemerintah pusat dengan memberikan perhatian lebih kepada Papua guna menyembuhkan luka sejarah yang pernah ditorehkan Pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua.

## **PENUTUP**

Terdapat kecenderungan untuk mendiametralkan identitas ke-Papua-an dan identitas ke-Indonesia-an pada sebagian kalangan OAP. Papua adalah Melanesia yang beragama Kristen dan telah diperlakukan secara tidak adil oleh Indonesia yang Melayu dan beragama Islam. Penguatan identitas ke-Papua-an akan semakin mengaburkan identitas ke-Indonesia-an orang Papua. Hal ini peneliti temukan dari pandangan beberapa generasi muda OAP yang peneliti temui. Untuk itu, perlu dilakukan rekayasa sosio-kultur baik menggunakan pendekatan politik maupun historis untuk memformulasi identitas ke-Indonesia-an OAP yang sinergis dengan identitas ke-Papua-an mereka.

Problematika nasionalisme ganda orang Papua sebagaimana yang diungkap oleh Bernarda Melerey pada dasarnya di sebagian generasi muda OAP berakar pada problematika identitas ke-Papua-an serta diskriminasi dan ketidakadilan yang dirasakan oleh orang Papua. Meski demikian, di sebagian informan yang peneliti temui telah terbuka ruang untuk menerima nasionalisme ke-Papua-an integral dalam ke-Indonesia-an. Hal ini merupakan angka progress bagi bagi pembentukan nasionalisme Indonesia pada generasi muda OAP yang selama ini selalu berada dalam bayang-bayang nasionalisme ganda dengan identitas yang luminal.

---

<sup>23</sup> Lihat Bernarda Meleray, Cahyo Pamungkas, *Majelis Muslim Papua: Strategi Pembentukan Identitas Orang Papua Asli yang Beragama Islam*, h. 6

## DAFTAR PUSTAKA

- Afwan, Budi Asyhari. *Mutiara Terpendam Papua: Potensi Kearifan Lokal untuk Perdamaian di Tanah Papua*. Yogyakarta: CRCS, 2015.
- Anderson, BROG, *Imagined Communities, Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso, 1991.
- Barker, C. *Cultural Studies: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2006
- Burke, Peter J dan Jan E. Steets. *Identity Theory*. New York: Oxford University Press. 2009.
- Castells. Manuel. *The Power of Identity*. Chisester: West Sussex: Blackwell Publishing Ltd, 2010.
- Damanik, Ahmad Taufan. *Hasan Tiro: Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis*, Jakarta: Friederich Ebert Stiftung [FES]. 2010.
- Kasniyah, Naniek. *Tahapan Menentukan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ombak. 2012.
- Malerey, Bernarda. *Kontestasi Nasionalisme Papua dan Nasionalisme Indonesia Sebelum dan Sesudah Orde Baru*, Makalah pada Seminar Akhir Tahun “Integrasi Sosial Ekonomi, Sosial Budaya, dan Sosial Politik Papua ke Indonesia: Tinjauan Akademik. Kamis 18 Desember 2014.
- Noerhadi, Toety Herati. *Aku dalam Budaya: Telaah Teori dan Metodologi Filsafat Budaya*, Jakarta: PT. Gramedia. 2013.
- Pamungkas, Cahyo. *Majelis Muslim Papua: Strategi Pembentukan Identitas Orang Papua Asli yang Beragama Islam*, Laporan Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2011.
- Sabara, “Pola Pembinaan Muallaf di Kota Jayapura, Jurnal *al-Qalam Volume 18 Nomor 2 Tahun 2012*, h.188-198.
- Sen, Amartya *Identity and Violence: the Illusion of Destiny*. New Yowk-London: W.W. Norton and Company, 2006.
- Wally, John Manangsang. *Dunia dalam Genggaman Papua: Sebuah Fenomena Geo-Politik Global*, Jayapura: Naskah Belum Diterbitkan, 2018.